

GERAKAN SOSIAL BARU: DEMONSTRASI BURUH DI JAWA TIMUR 2013**Irfa' Asy'at Firmansyah**Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
irfraziel@gmail.com**Mawardi Purbo Sanjoyo**Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
mawardiqsanjoyo@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini membahas terkait gerakan sosial para buruh dalam memperjuangkan hak kehidupan buruh yang tidak terakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Langkah yang dapat dilakukan yakni demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh di Jawa Timur di Gedung Negara Graha Surabaya dengan memanfaatkan kelompok-kelompok organisasi buruh sehingga memberikan jumlah massa yang banyak agar aspirasi mereka dapat didengar oleh pemerintah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan media massa yang membuat berita gerakan sosial para buruh di Jawa Timur pada tahun 2013.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Buruh, Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa hal mengapa suatu gerakan massa oleh buruh hingga saat ini dapat dikatakan belum mencapai kemandirian, hal ini disebabkan karena cikal bakal gerakan buruh di Indonesia bukan transisi dari masyarakat feodal ke kapitalisme industri sebagai mana yang terdapat di negara Eropa. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya primordial sehingga isu-isu terkait etnis, agama, dan kelompok mendapatkan perhatian lebih berbeda jika dibandingkan isu buruh. Fenomena ini terdapat kondisi objektif yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdapat perbedaan agama, etnis, dan ras. Bentuk keberagaman yang seperti menjadikan wajah Indonesia sebagai negara plural dan majemuk. Akan tetapi, keberagaman seperti ini menjadikan sebuah negara yakni Indonesia lebih rentan terjadinya berbagai konflik yang disebabkan oleh berbagai kepentingan yang berbeda (Faedlulloh 2019:168).

Jika dilihat akar historis mengenai gerakan buruh di Indonesia merupakan bentuk manifestasi gerakan politik. Sebagaimana berdirinya *Vereeniging van Spooren en Tramweg Persone* (VSTP), Perkumpulan Bumipetera Pabean (PBP), Persatuan

Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), *Personeel Fabriek Bond* yakni Himpunan Pekerja Pabrik yang didirikan sekitar awal abad ke-20 tersebut bahwa terlihat jelas unsur politiknya sangat kuat (Faedlulloh 2019:169).

Awal munculnya gerakan buruh di Indonesia dapat ditandai dengan diberlakukannya Sistem Tanam Paksa oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1830. Dalam prakteknya kebijakan ini sebenarnya untuk mengubah sistem pertanian yang telah ada. Pemerintah kolonial Belanda mempekerjakan para pemilik lahan pertanian sebagai buruh tani tanpa mendapatkan upah. Selain itu munculnya paham komunisme berhasil mempengaruhi para pekerja di Indonesia. Pemahaman ini bercorak perlawanan dari kelompok buruh tani (*proletar*) kepada pemerintah kolonial Belanda. Masifnya gerakan buruh saat melakukan aksi mogok membuat keberadaan pemerintah saat itu merasa terancam. Sebelumnya pemerintah telah mencurigai gerakan-gerakan ini ditunggangi oleh kelompok komunis, sehingga pada tahun 1930 pemerintah kolonial membubarkan Sarekat Kaum Pekerja Indonesia (Tricahyono 2020:3).

Pemogokan-pemogokan juga terjadi pada tahun 1920-an dengan mengandalkan organisasi. *Personeel Fabriek Bond* (PFB) tahun 1920 memobilisasi pemogokan yang dikarenakan majikan menolak mengakui PFB sebagai organisasi yang mewakili anggotanya. Di Surabaya juga terjadi pemogokan oleh 800 buruh pada 15 November 1920 (DS and Cahyono 2003:13). Pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1965 yaitu di masa orde baru maka berakhir juga gerakan komunis oleh militer tahun 1965 hingga 1966. Salah satu organisasi buruh yang beridri di era orde baru yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FSBI) didirikan oleh Agus Sudono 20 Februari 1973.

Agus Sudono menjabat sebagai ketua umum sedangkan Soewarto menjadi sekretaris umum. Pada tanggal 11 Maret 1974 FBSI dikukuhkan sebagai serikat buruh tunggal oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga. Pada tahun 1985 Soeharto merasa bahwa Sudono tidak dapat dikontrol sehingga ia disingkirkan. Organisasi FBSI diganti menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan memilih Imam Sudarwo sebagai ketua umum. Pada dasarnya lembaga yang dibentuk era orde baru tidak berfungsi dengan baik. Bahkan dalam menyelesaikan kasus perburuhan Soeharto memanfaatkan para militer untuk mengatasi. Para militer diberikan kekuasaan secara penuh untuk mengkondisikan stabilitas politik. Berbagai gerakan buruh masa orde baru pada dasarnya tidak ada kekerasan, akan tetapi sikap dari para militer

bersenjata dalam mengkondisikan aksi tersebut berakibat fatal seperti kasus pembunuhan Marsinah (DS and Cahyono 2003:38).

Munculnya gerakan buruh selalu didasari oleh ketimpangan yang terjadi karena ketidakstabilan ekonomi atau kebijakan para pemimpin daerah. Aksi gerakan tersebut sebagai bentuk perjuangan para kaum buruh. Mengingat bahwa pada akhir tahun 2021 pernah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran oleh para pekerja seluruh Jawa Timur berlokasi di Gedung Negara Graha Surabaya. Ir. Heru Tjahjono selaku Gubernur Jawa Timur mengumumkan secara resmi kenaikan upah tahun 2022 sebanyak Rp 22.790,44 di tahun sebelumnya. Kenaikan upah bagi para buruh tidak sesuai dengan keinginan para buruh, sehingga mereka menuntut agar upah tersebut dinaikan sekitar Rp 275.000-Rp 300.000. Massa pada aksi demo oleh para buruh dihadiri dari seluruh wilayah Jawa Timur sebanyak 50.000 massa. Para buruh memperjuangkan haknya ditengah-tengah situasi pandemi Covid-19 (Rahma, Fauzi, and Swarizona 2022:101).

Pada tahun 2013 aksi demonstran para buruh kembali terjadi secara besar-besaran di depan Gedung Negara Graha Surabaya. Jumlah massa mencapai sekitar ribuan yakni dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Mereka menuntut pencabutan kenaikan UMK Jatim tahun 2014 naik sebesar 45%. Besaran gaji yang dituntut oleh para demonstran untuk tahun 2014 berkisar Rp 2,5 juta dari gaji saat ini khusus untuk Ring I, rata-rata sebesar Rp 1,7 juta (Anon 2013). Oleh karena itu, sebuah ekspresi gerakan sosial baru yang dilakukan oleh para buruh karena sistem kapitalis global yang berimbas ke seluruh ranah perekonomian nasional, perekonomian dengan skala besar, hingga menyentuh ke perekonomian rakyat kecil menarik untuk dikaji secara kritis. Pasca reformasi tumbangnya sebuah rezim dengan cara kepemimpinan yang diktator, terbuka kebebasan memberikan kelonggaran bagi rakyat untuk berserikat dalam menentukan organisasi-organisasi masyarakat.

Bagi kelompok buruh juga semakin terorganisir untuk memperjuangkan atas tuntutan hak mereka. Meskipun problema perburuhan di Indonesia belum dapat dikatakan final masih perlu banyak perbaikan. Demo buruh masih terus mewarnai pemberitaan media-media massa baik yang bersifat lokal maupun nasional. Demo buruh ini tidak lain adalah menuntut perbaikan kesejahteraan kepada pemerintah. Artinya, pemerintah yang berkuasa menggodok peraturan kemudian disahkan oleh DPR

sebagai legislatif, dan diharapkan peraturan yang telah dirumuskan dapat berguna bagi kesejahteraan buruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk ilmu-ilmu sosial, humaniora khususnya yang fokus pada hubungan dengan pola dan tingkah laku manusia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan media massa. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau literatur sebagai jenis pendekatannya. Studi kepustakaan mencoba untuk memecahkan permasalahan yang bersumber dari sumber kepustakaan agar mendapatkan hasil analisis yang kritis dan mendalam (Sari and Asmendri 2020:15).

PEMBAHASAN

Dengungan Globalisasi akhir-akhir ini sering didengarkan gaungnya. Dalam era globalisasi ini yang menjadi sasaran pasar bebas adalah semua negara. Tetapi apabila dipikirkan dengan cermat, globalisasi dapat mempengaruhi aspek perekonomian bangsa. Dewasa ini masyarakat kapitalis umumnya ditandai oleh terciptanya polarisasi sosial diantara para pemilik kapital dengan pekerja. Kebebasan kaum kapitalis adalah kebebasan yang ditopang oleh penguasaan faktor-faktor produksi, dengan faktor-faktor produksi kaum kapitalis memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan membeli kebebasan yang dimiliki komponen masyarakat lainnya. Kondisi dunia yang telah dihegemoni oleh kekuatan kapitalisme global mencengkram seluruh sendi-sendi kehidupan. Dua sifat utama dari kapitalisme yaitu eksploitatif dan ekspansif. Kedua wajah kapitalisme ini berjalan beriringan sehingga pencapaian tujuan kapitalisme untuk meningkatkan akumulasi modal semakin masif.

Demo buruh yang seringkali dilakukan ini termasuk dalam gerakan sosial baru, dimana ciri-ciri dari gerakan sosial ini antara lain adalah:

1. Menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh; ruang sosialnya mengalami penciutan dan yang “sosial” dari masyarakat sipil tengah digerogeti oleh kemampuan kontrol negara.

2. Secara radikal gerakan sosial baru mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas.
3. Mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun penopang aksi kolektif, gerakan sosial baru pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dengan model politik kepartaian.
4. Struktur gerakan sosial baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, dan orientasi, dan oleh heterogenitas basis sosial mereka (Singh 2010:125–29).

Robert Mirsel mendefinisikan gerakan sosial merupakan seperangkat keyakinan dan tidak terlembagakan (*non-institutionalized*) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk memajukan dan menghalangi perubahan di dalam masyarakat (Mirsel 2004:6). Menurut Tarrow (1994), “Gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interkasi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, lawan, penguasa” (Klandermans 2005:xiii). Lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh Sartono bahwa Sebagai aktifitas kolektif pergerakan sosial hendak mewujudkan atau sebaliknya, menolak suatu perubahan dari susunan masyarakat, seringkali dengan jalan yang radikal revolusioner (Kartodirdjo 1982:205–6).

Buruh mempunyai kekuatan dalam kelompoknya, dimana antara buruh satu dengan yang lainnya mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi. Kekuatan ini di dapat dari semangat perjuangan buruh untuk menuntut keadilan bagi dirinya. Terkadang tuntutan buruh mengenai kesejahteraan kurang dipenuhi oleh pemerintah, maka tidak jarang para buruh harus turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Hal ini juga terjadi di Jawa Timur dimana pada bulan Oktober tahun 2013 para buruh turun ke jalan dan menyuarakan aspirasinya. Dalam aksi tersebut buruh menuntut enam tuntutan, yaitu: 1) UMP Jawa Timur dinaikan sebesar Rp 3 juta, 2) penolakan terhadap Inpres 9/2013 terkait Kebijakan Penetapan Upah Minimum, 3) Nasionalisasi asset-aset vital negara di bawah kontrol rakyat, 4) Menciptakan industri nasional yang kuat, 5) Pendidikan gratis, 6) Menghapus sistem kontrak (*outsourcing*).

Sebagaimana tuntutan para buruh tersebut, dan gerakan dari buruh itu sendiri merupakan bagian dari gerakan sosial baru. Maka seperti yang diidentifikasi oleh Rajendra Singh bahwa tujuan dari gerakan sosial baru adalah untuk menata kembali

relasi negara, masyarakat, dan perekonomian, dan untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya wacana demokratis ihwal otonomi dan kebebasan individual, serta kolektifitas, identitas, orientasi mereka bisa disusun dan diperiksa selalu (Singh 2010:129). Lantas bagaimanakah buruh mengakomodasi kekuatan yang dimilikinya, sebagaimana di atas dikatakan sebagai gerakan sosial baru?

Outsourcing Belum terselesaikan dan Upah Harus Dinaikkan

Beberapa masalah mengenai perburuhan pasca reformasi terkait pengangguran telah berdampak pada tingginya jumlah pekerja sektor informal, pendidikan, sistem pengupahan, kontrak kerja, sistem pengawasan terhadap para pekerja, dan permasalahan jaminan sosial tenaga kerja. Isu seperti ini sangat menggiurkan untuk dibahas karena permasalahan ini muncul saat kampanye partai politik. Bahkan agenda ini terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berhenti karena isu ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kontrak kerja atau outsourcing merupakan suatu sistem yang lahir dari sistem kapitalisme modern. Outsourcing sebagai wujud dari fleksibilitas pasar kerja melalui proses produksi.

Outsourcing memiliki dua model yaitu outsourcing pekerjaan dan outsourcing manusia. Outsourcing pertama berkaitan dengan pemborongan pekerjaan dengan pihak lain, sedangkan yang kedua praktek yang memberikan efisiensi dalam operasional bisnis dengan tingkatan tertentu. Akan tetapi praktek ini justru telah merugikan bagi para buruh sehingga praktek ini kemudian yang ditentang oleh para buruh melalui gerakan buruh di Indonesia. Pasca disahkan UU No. 13 Tahun 2003 sistem outsourcing semakin berkembang bahkan hampir seluruh perusahaan menerapkan ke dalam bentuk kontrak kerja yang pendek.

Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 sebagai landasan hukum untuk sebuah perusahaan “outsourcing” dan para pengusaha yang berkonspirasi menerapkan sistem “outsourcing”. Bunyinya sebagai berikut: "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis". Melalui pasal tersebut pemerintah secara tidak langsung telah mengakui penerapan sistem outsourcing padahal sistem ini merupakan peninggalan para kolonial Belanda yang dulu diterapkan pada perkebunan di Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-IX/2011 menyebutkan bahwa sistem "outsourcing" bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK ini tidak bermakna dan berarti apa-apa jika tidak ditegakkan dan dijalankan. Praktik "outsourcing" di Jawa Timur sudah semakin parah. Data dari (Lembaga Bantuan Hukum) LBH Surabaya menyebutkan bahwa, THR 2011 di Jawa Timur 91,8% yang menjadi korban adalah buruh "outsourcing". Pelanggaran paling banyak terjadi di wilayah Sidoarjo. Untuk itu pihak dari beberapa elemen buruh mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus menertibkan, membubarkan, dan memidanaka perusahaan penyedia jasa "outsourcing".

Selain upaya pemberhentian "outsourcing", dalam demo kali ini para buruh juga menuntut adanya kenaikan gaji. Melalui tuntutan untuk memperbesar UMR, para buruh berharap agar mendapat gaji yang dikehendakinya. Karena menurut para buruh, UMR yang berlaku pada saat ini tidak dapat mencukupi pengeluaran sehari-harinya. Selain itu akibat dari naiknya harga sejumlah bahan pokok ditengarai sebagai penyebab semakin getolnya para buruh untuk berdemonstrasi menuntut kenaikan upah.

Jalannya Demonstrasi

Demonstrasi buruh terjadi di berbagai kota di Jawa Timur. Demo tersebut berlangsung di beberapa kota, antara lain di Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan kota lainnya di Jatim. Di Surabaya, tepatnya di gedung negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, ratusan buruh yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) dan Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) menjalankan aksi turun jalan.

Jamaluddin, Koordinator lapangan aksi KNGB mengatakan bahwa demo kali ini kaum buruh mengajukan enam tuntutan. "Satu di antaranya adalah menuntut penghapusan outsourcing dan pemberlakuan jaminan sosial bagi buruh". Kejadian di Pasuruan, saat didemo ribuan buruh, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menemui ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang menggelar demo di depan rumah dinas. Kemudian mengatakan bahwa ia baru saja menandatangani tuntutan para pendemo untuk ditindak lanjuti.

Selanjutnya terjadi aksi gabungan dari berbagai serikat buruh yang memaksa Gubernur Jawa Timur, Soekarwo turun langsung menemui ribuan buruh dari wilayah

Ring I (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan) yang melakukan aksi mogok kerja nasional di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013. Pada hari itu juga, Soekarwo yang datang ke Grahadi bersama beberapa staf meminta perwakilan buruh untuk berdialog. Sedikitnya 30 orang perwakilan buruh telah masuk ke dalam Gedung Grahadi Jl Gubernur Suryo, Surabaya untuk melakukan dialog.

Sementara itu, di luar Grahadi, ribuan buruh dari berbagai daerah tersebut secara bergiliran berorasi menyurakan aspirasi dengan pengeras suara dari atas truk. Mereka mendesak pemerintah Provinsi merealisasikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp 3 juta perbulan untuk daerah Ring I Jawa Timur (Ridwan 2014). Daerah ring I merupakan wilayah-wilayah Industri dimana bagi para buruh di ring I tersebut UMK harus lebih tinggi, karena tempat-tempat tersebut merupakan basis industri, dan biaya hidup di wilayah tersebut tergolong lebih tinggi.

Pertemuan antara perwakilan elemen buruh dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo akhirnya menghasilkan sejumlah keputusan yang dinilai akan meningkatkan upah buruh di Jatim. Beberapa keputusan hasil pertemuan diantaranya, pencabutan Inpres Nomor 9/2013 akan diusulkan kepada Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian akan menerbitkan Pergub terkait kapasitas KHL yang meliputi kenaikan besaran uang listrik, transportasi dan perumahan. Selain itu, akan menerbitkan Pergub tentang penghapusan sistem pekerja outsourcing. Untuk merumuskan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) akan disurvei dulu tentang tiga hal tadi yaitu listrik, transportasi dan perumahan. Serta menunggu usulan dari kabupaten/kota,” ungkap Pakde Karwo dihadapan massa buruh dengan didampingi Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya di pelataran Gedung Grahadi Surabaya (Ridwan 2013). Dari penjelasan Pak Dhe-sapaan akrab Gubernur Soekarwo-para buruh seakan tidak puas dengan penjelasannya. Saat akan diakhiri massa tidak mau dan berteriak serempak belum selesai. “Tunggu, kami ingin kepastian nominal UMK 2014 itu berapa?,” teriak salah satu buruh diatas pickup yang dibawanya (Ridwan 2013). Menanggapi hal tersebut Gubernur Jawa Timur ini menyatakan bahwa besaran nominal belum bisa ditentukan karena masih harus menunggu usulan dari setiap kabupaten/kota di Jatim.

Sementara, Perwakilan Tim Hukum buruh dari Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), Pudji juga ikut menjelaskan bahwa Jawa Timur jadi satu-satunya provinsi yang sudah

punya draf yang bisa dijadikan percontohan nasional. “Bulan ini di daerah manapun belum ada yang menentukan angka. Aksi kita memang menuntut sekurang-kurangnya kenaikan UMK nanti bisa sampai pada nilai 3 juta. Tapi sekarang ini baru akan dirumus. Kalau ngomong angka itu belum etis, kalau menyebut sekarang maka kita kayak orang bodoh. Saya ini orang hukum. Buruh harus ngerti hukum, jangan hanya asal”. Dia minta para buruh menghentikan aksinya dan tidak menginap di depan Grahadi, karena Pemprov Jatim sudah mengeluarkan kebijakan. “Semua keputusan harus ada tahapnya. Maka sepakat ya semua hari ini kita putuskan tidak menginap disini” (Ridwan 2013).

“Kristalisasi Keringat” Demonstrasi

Tahun yang baru sudah sedikit menunjukkan wajahnya di depan, dan setitik cerah harapan mulai ada untuk tahun depan. Pada tanggal 20 November 2013, Gubernur Jawa Timur telah menetapkan besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota penetapan UMK Jatim 2014 ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 tahun 2013 dan sudah ditanda tangani oleh gubernur pada Rabu malam itu juga. Dari 38 kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa Timur, UMK kota Surabaya adalah yang paling tinggi dengan angka Rp 2,2 juta, kemudian kota Gersik di posisi kedua. Sedangkan UMK terendah adalah untuk wilayah Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan serta Magetan, dengan nilai yang sama yakni sebesar satu juta (Arfani 2013).

Walaupun hanya masalah upah yang dinaikkan dan “outsourcing” yang masih belum jelas kabarnya, tetapi paling tidak per 1 Januari, para buruh sudah mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh Gubernur. Memang perjuangan buruh belum usai sampai disini saja, ada hak-hak lain yang semestinya harus dipenuhi. Tetapi buruh sebagai tenaga kerja, bukan masalah tenaga saja, tetapi profesionalisme kerja patut ditinggikan pula oleh seorang buruh.

KESIMPULAN

Buruh memiliki kekuatan dari kelompok yang didirikan, oleh karena itu antara buruh satu dengan lainnya mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi. Kekuatan tersebut di dapat dari semangat perjuangan buruh untuk menuntut sebuah keadilan ke

pemerintah. Gerakan sosial buruh di Jawa Timur pada tahun 2013 telah menuntut agar kenaikan gaji UMR. Karena bagi mereka UMR yang didapat tidak dapat mencukupi kehidupan para buruh. Selain itu, naiknya bahan pokok membuat para buruh semakin ingin untuk berdemonstrasi agar upah dapat dinaikkan. Tuntutan yang dibawa oleh para buruh dalam aksi tersebut menuntut keras penghapusan outsourcing dan pemberlakukan jaminan sosial bagi kehidupan para buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2013. "Ribuan Buruh Demo Di Grahadi Tuntut Umk Naik 45 Persen." *Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. Retrieved February 25, 2023 (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/37132>).
- Arfani, Fiqih. 2013. "Buruh Tidak Puas Nilai UMK Jatim 2014." *ANTARA*. Retrieved February 25, 2023 (<https://www.antaraneews.com/berita/405923/buruh-tidak-puas-nilai-umk-jatim-2014>).
- DS, Soegiri, and Edi Cahyono. 2003. *Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Faedlulloh, Dodi. 2019. "Kegagalan Gerakan Buruh Dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10(2):167–82. doi: 10.22212/jp.v10i2.1448.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Gramedia.
- Klandermans, Bert. 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rahma, Rosselina Mulya, Agus Macfud Fauzi, and Silkania Swarizona. 2022. "Kesadaran Dan Perjuangan Buruh Jawa Timur Dalam Menolak Upah Murah Di Era Pandemi." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8(1):93. doi: 10.35308/jcpds.v8i1.5352.
- Ridwan, Mohammad. 2014. "Mogok Nasional, Gubernur Soekarwo Menemui Ribuan Buruh Di Grahadi ." *LensaIndonesia.Com*. Retrieved February 25, 2023 (<https://www.lensaIndonesia.com/2013/10/31/mogok-nasional-gubernur-soekarwo-temui-ribuan-buruh-di-grahadi.html>).
- Ridwan, Muhammad. 2013. "Gubernur Jatim Dukung Pencabutan Inpres 9/2013." *LensaIndonesia.Com*. Retrieved February 25, 2023 (<https://www.lensaIndonesia.com/2013/11/01/gubernur-jatim-dukung-pencabutan-inpres-92013.html>).
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6(1):41–53. doi: 10.15548/NSC.V6I1.1555.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Tricahyono, Danan. 2020. "Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942." *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 16(2). doi: 10.21831/ISTORIA.V16I2.35500.